



**BAPPENAS**

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

# e-klipping

*Kumpulan Berita Harian Media Online*

SUBJEK

WILAYAH DAN TATA RUANG

Rabu, 17 Mei 2023

**BIRO HUMAS, KEARSIPAN DAN TATA USAHA PIMPINAN**  
**Perpustakaan**  
**2023**

## **Daftar Isi**

1. EMBRIO KONFLIK AGRARIA DI NUSANTARA – *Media Online Bisnis Indonesia*
2. BAPPENAS APRESIASI PEMDA LEWAT PPD 2023 – *Media Online Media Indonesia*
3. NATIONAL DEVELOPMENT PLANNING AGENCY HOLDS MUSRENBANGNAS RKP 2024 – *Media Online The Jakarta Post*

| IBU KOTA BARU |

## EMBRIO KONFLIK AGRARIA DI NUSANTARA

Lahan di Nusantara mulai 'memerah'. Banyaknya area yang dijadikan lahan pembangunan Ibu Kota Negara itu berisiko menimbulkan sengketa yang berujung konflik agraria antara pemerintah dan masyarakat. Akar persolannya adalah banyaknya tanah hak masyarakat yang tersedot ke pusaran Nusantara.

Annisa Rizki Kamalina & Teguh Ariel  
ndaka@bisnis.com

**K**ondisi ini pun diakui oleh pemerintah dan menjadi pekerjaan rumah baru yang wajib segera dituntaskan untuk meminimalkan terjadinya konflik.

Kondisi ini pula yang kemudian mendasari penangku kebijakan di level eksekutif untuk mengajukan revisi Undang-Undang (UU) No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara ke Dewan Perwakilan rakyat (DPR).

Perkara lahan memang sangat sensitif. Masyarakat pun wajar apabila haknya atas tanah tebis diambil alih negara tanpa hitung-hitungan yang jelas.

Cekaknya, situasi demikian banyak ditemui pemerintah di lokasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, sebagaimana dinyatakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Soeharso Monoarfa.

Tanpa menyebutkan secara terperinci, Soeharso mengatakan ada banyak hak masyarakat yang berada dalam area pembangunan

pusat pemerintahan baru itu. Sementara itu, dimulainya megaprojek tersebut secara otomatis membatasi akses masyarakat pemilik lahan sebelumnya.

Di sisi lain, UU No. 3/2022 mengamanatkan bahwa seluruh area yang dijadikan lokasi Ibu Kota baru mutlak menjadi milik negara, dengan hak kelola dimiliki oleh Otorita IKN.

Inilah kemudian yang melahirkan embrio konflik agraria dan berupaya ditangani oleh negara.

"Sekarang kami sedang menyusun kembali perubahan UU itu. [Yang diperbaiki] dalam kewenangannya [pemerintah/Otorita IKN], soal pertanahannya," kata Soeharso, Selasa (16/5).

Selanjutnya, kekhawatiran dari banyak kalangan mengenai sengketa lahan di Nusantara telah disuarakan sejak jauh-jauh hari. Maklum, area yang akan menjadi kota baru itu amat luas yakni mencapai 324.332 hektare.

Dari jumlah tersebut, 256.142 hektare di antaranya merupakan wilayah daratan yang memiliki potensi konflik.

Secara terperinci, dari jumlah itu 199.962 hektare untuk Kawasan Pengembangan Nusantara, 56.180 hektare untuk Kawasan Ibu Kota Nusantara, dan 6.671 hektare untuk

Kawasan Inti Pusat Pemerintahan.

Suharso menambahkan fakta di lapangan banyak lahan yang masuk ke dalam cakupan Nusantara tersebut masih dimiliki oleh masyarakat, yang kemudian memperjuangkan haknya kepada negara.

"Presiden [Joko Widodo] mengasikan Bappenas untuk menanganinya itu melalui revisi [UU IKN]," ujarnya.

Hingga saat ini, revisi UU No. 3/2022 masih dibahas secara tertutup di DPR, sehingga belum bisa diketahui publik mengenai substansi yang akan diubah.

Akan tetapi, apabila lahan menjadi isu strategis, hendaknya pemerintah juga perlu memberikan jaminan untuk tidak mengukir-ukir ketentuan perihal konsesi.

Musabahnya, beberapa konsorsium yang membatalkan investasinya di Nusantara pada tahun lalu disebabkan oleh gagalnya negosiasi atas tukar guling penanaman modal alias investasi dengan konsesi.

### KONSESI SDA

Berdasarkan informasi yang diperoleh *Bisnis*, konsorsium investor asing sempat meminta adanya konsesi sumber daya alam (SDA) sebagai salah satu syarat dari masuknya dana jumbo ke kawasan di Pulau Kalimantan itu.

Namun, permintaan itu ditolak



**Sekarang kami sedang menyusun kembali perubahan UU itu. [Yang diperbaiki] dalam kewenangannya [pemerintah/Otorita IKN], soal pertanahannya.**

pemerintah lantaran tidak dapat diakomodasi dalam UU No. 3/2022.

Dalam rangka menjaga kedaulatan, idealnya skema soal konsesi itu tetap sehingga lahan negara tidak bisa dijadikan bahan tukar guling investasi.

Sesungguhnya, keputusan pemerintah untuk menolak syarat konsesi SDA dalam perburuan investasi di IKN memang patut diapresiasi.

Hal ini kian menegaskan bahwa pemangku kebijakan berusaha untuk bermain bersih dalam memuluskan proyek yang awalnya ditaksir menelan anggaran Rp466 triliun itu.

Namun di sisi lain, keputusan ini memisyakan tantangan yang cukup berat, yakni pemerintah dituntut lebih agresif dalam menjangkau minat investor.

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan pemerintah telah menyiapkan tim satuan tugas khusus yang akan menangani seluruh problem maupun kendala pembangunan Ibu Kota baru, terutama soal lahan.

"Kita ingin segalanya *clear and clear*, jadi yang ditawarkan ke investor tanah yang sudah matang dan kita ketahui harganya sehingga bisa langsung dihitung berdasarkan kondisi topografi, geologi, dan akses," jelasnya.

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mempersiapkan skema pembelian tanah sekaligus kaveling lahan untuk investor di IKN yang ditargetkan rampung akhir 2023.

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan instansinya tengah mempersiapkan kaveling-kaveling di wilayah Kawasan Inti

Pusat Pemerintahan.

"Prosesnya sedang dalam persiapan, dibentuk satgas dalam rangka percepatan pengadaan dana buat investor," katanya.

Sekadar informasi, proses perolehan tanah di IKN dilakukan dengan dua mekanisme. *Pertama*, pelepasan kawasan hutan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Dalam hal ini, KLHK berperan untuk melepas kawasan hutan seluas 36.150,03 hektare kepada Otorita IKN.

*Kedua*, pengadaan tanah melalui Kementerian PUPR dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Pengadaan tanah di sebagian Kawasan Inti Pusat Pemerintahan yang dilakukan oleh tim pembebasan lahan telah diproses sebanyak 330 bidang, dengan 18 bidang telah dibayarkan dan 312 bidang sedang dalam proses.

"Tanah-tanah itu pada prinsipnya sedang disiapakan oleh Otorita IKN berdasarkan tanah-tanah dari kehutanan, ada dua prinsip, tanah kehutanan, dan tanah kegunaan lain. Ada yang buat investasi, ada buat infrastruktur," ujarnya.

Seolah tak mau kecolongan, pada saat bersamaan pemerintah juga menerbitkan regulasi yang mengatur soal tata kelola aset di Nusantara yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 53/2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Aset dalam pengisian di Ibu Kota Negara.

Aturan tersebut merupakan aturan turunan dari Peraturan pemerintah (PP) No. 17/2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Beleid ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan barang milik negara (BMN) dan aset dalam penguasaan (ADP) di Nusantara.

Dalam kaitan ini, Menteri Keuangan bertanggung jawab dan berwenang untuk meneliti dan menyetujui standar barang dan kebutuhan BMN di IKN yang diusulkan Otorita IKN.

Adapun, Kepala Otorita IKN berwenang sebagai pengguna barang, dan dapat melimpahkan sebagian tanggung jawab dan kewenangan kepada Kuasa Pengguna Barang. (Marie Chana/AP-ah Rahmah Haridaj) 13



## PEKERJAAN RUMAH BERAT

Sengkerut lahan di pusat pemerintahan baru masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk mewujudkan kota pengganti Jakarta pada masa mendatang.

### Rencana Pengalokasian Anggaran dalam Buku Saku IKN (Rp Triliun)

Sumber	Target	Realisasi Per Februari 2023
APBN	89,4	23,9
Kerja Sama Pemerintah & Badan Usaha Swasta	253,4	41,0
Total Kebutuhan	466	64,9

### Insentif di Nusantara

Jenis Fasilitas/Kemudahan	Jangka Waktu/Tarif (%)
IGU	95 Tahun
HGB	80 Tahun
Hak Pakai	80 Tahun
Pekerja Asing	10 Tahun
Tax Holiday	50%-100% (10-30 Tahun)
Super Tax Deduction	250%-350%
PPN ZI Final DTP	Sampai 2035
Pajak UMRM	Dibebaskan
PPN Pengalihan Tanah	100%
PPN	Tidak Dipungut
PPSH	Dibebaskan
Bea Masuk & PDRB	Dibebaskan

Sumber: PP No. 17/2022, Otorita Nusantara, Kementerian Keuangan



Rabu, 17 Mei 2023

## Bappenas Apresiasi Pemda lewat PPD 2023

Jawa Tengah meraih provinsi terbaik pada kategori perencanaan dan pencapaian terbaik, disusul posisi kedua Sumatra Selatan, dan posisi ketiga Jawa Barat.

Ihfa Firdausya  
ihfa@mediaindonesia.com

**K**EMENTERIAN Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) kembali memberikan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD). Penghargaan diberikan kepada daerah yang menyusun perencanaan berkualitas dan mencapai target pembangunan daerah.

PPD 2023 dilaksanakan berbarengan dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 dan Peluncuran Proyeksi Penduduk 2020-2050, di Jakarta Convention Center, kemarin.

"Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, Kementerian PPN/Bappenas memberikan PPD yang merupakan evaluasi komprehensif dan kreatif untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan pembangunan pusat dan daerah, serta sebagai bentuk motivasi dan apresiasi kepada pemerintah daerah atas prestasinya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.

Jawa Tengah meraih provinsi terbaik pada kategori perencanaan dan pencapaian terbaik. Capaian indeks pembangunan manusia (IPM) Jateng dinilai lebih baik melalui kebijakan prioritas daerah pada penyelenggaraan pendidikan secara luas, pembangunan kesehatan, serta kualitas pembangunan perempuan dan anak. Peringkat kedua dan ketiga berturut-turut ditempati Sumatra Selatan dan Jawa Barat.

Selanjutnya, peringkat pertama kategori perencanaan dan pencapai-

**MENYAMPAIKAN ARAHAN:** Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan arahan pada penutupan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2023 di Jakarta, kemarin.

an terbaik tingkat kabupaten diraih Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Pencapaian itu diraih berkat pertumbuhan ekonomi, IPM, rasio gini, tingkat pengangguran ter-

buka (TPT), kemiskinan, didukung program peningkatan kapasitas penerima Program Keluarga Harapan (PKH), kesejahteraan petani kopi, daya tarik wisata, dan penurunan

angka kematian bayi (AKB) serta angka kematian ibu (AKI) serta kedua diraih Kabupaten Aceh Barat dan ketiga, Kabupaten Garut. Pada kategori perencanaan dan

pencapaian terbaik tingkat kota, peringkat pertama diraih Kota Sukabumi. Hal itu didapatkan berkat capaian tingkat kemiskinan, IPM, dan pertumbuhan ekonomi, didu-

kung 15 program unggulan, opini BPK WTP 8 kali berturut-turut, serta penyerapan belanja terbaik ke-2 nasional. Peringkat kedua diraih Kota Palu dan ketiga, Kota Semarang.

### Keterpaduan pelaksanaan

Kategori khusus bidang ekonomi hijau dan rendah karbon diraih Provinsi Riau, kategori khusus bagi provinsi yang memulai inisiasi awal ekonomi sirkular didapat Provinsi Jawa Tengah dan kategori khusus inovasi pembiayaan alternatif kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) untuk penyediaan infrastruktur dimenangi Kabupaten Madiun.

"Penghargaan itu merupakan apresiasi kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang berhasil dengan baik dalam perencanaan, pencapaian pelaksanaan, dan inovasi pembangunan. Dengan PPD itu, diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan yang lebih konsisten, komprehensif, terukur, dan dapat diimplementasikan (*applicable*)," kata Suharso.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang turut hadir dalam acara itu memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang memperoleh PPD. Wapres meminta keterpaduan pelaksanaan pembangunan pusat dan daerah terus ditingkatkan.

"Dengan perencanaan, pelaksanaan, dan inovasi pembangunan, demi mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan," pungkaskan Ma'ruf. (5-2)

ANTARA/HAFIDZ MUBARAK A

## National Development Planning Agency holds Musrenbangnas RKP 2024

Over 2,000 people representing the central and regional governments attended the National Development Planning Conference (Musrenbangnas) and release of the Population Projection 2020-2050 yesterday.

The event, organized by the Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency (Bappenas) was conducted online and offline at the Jakarta Convention Center (JCC) to highlight the government work plan (RKP) for 2024. The attendants included secretaries of ministries/agencies, heads of planning bureaus, regents, mayors, heads of the regional development planning agencies, youth (millennials) and the general public.

"The event is an elaboration of the final year of the 2020-2024 national middle-term development planning (RPJMN). The RKP 2024 is focused on achieving the development targets set at the RPJMN 2020-2024 and laying strong foundations for the Golden Year 2045. It carries the theme of Accelerating Inclusive and Sustainable Economic Transformation, explained agency head Suharso Monoarfa.

The RKP 2024 includes seven national priorities, including strengthening economic resilience for just and quality growth, developing regions to reduce disparity and ensure equitable development, scaling up quality human resources and competitiveness, mental revolution and cultural development, strengthening



infrastructure to support economic development and basic services, developing the environment, increasing disaster resilience and climate change preparation, and finally, strengthening the stability of politics, law and human rights and public service transformation.

The RKP 2024 is carried out by adhering to eight policy directions, including poverty reduction, enhancement of the education and health quality, improving business competitiveness, revitalizing industry and strengthening applied research, development of low carbon and energy transition, accelerating basic infrastructure and connectivity development, accelerating the development of the new capital Nusantara and the implementation of the 2024 general election.

The Musrenbangnas RKP 2024 event also

featured the release of the Population Projection 2020-2050, which prepares Indonesia's population by 2045 through five strategies. These strategies include Ensuring Balanced Population Growth; Drafting Family Planning Policy in the New Era; Encouraging the Equitable Distribution of Population; The New Era of Transmigration; Sustaining an Aging Population; Preparing a Self-Reliant Aging Population; Closing the Human Resource Gap through Early and Affirmative Childhood Preparation; and Balanced Urban and Rural Development.

"The document on the 2020-2050 Population Projection should serve as reference for ministries and regional administrations to draft programs that can optimize the potential of our demographic bonus," said Vice President Ma'ruf Amin.

## Bappenas presents PPD Award for regional governments' achievements

As in previous years, the Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency (Bappenas) presented the Regional Development Award (PPD) 2023 to regional governments at the Musrenbangnas RKP 2024.

The PPD is a creative and comprehensive evaluation to enhance integration and award effective implementation of development programs by central and regional governments, according to Bappenas.

"The award is a display of appreciation for provincial, regency and mayoralty governments for their success in terms of development planning, implementation achievements, and innovations," Minister for National Development

Planning/Head of Bappenas Suharso Monoarfa said.

The PPD Award was expected to encourage regional governments to draft more consistent, comprehensive, measured development plans that are applicable.

The award is also expected to increase the synergy and synchronization between central and regional governments in terms of development plans and spur innovation to achieve regional-development targets underpinning national development.

Bappenas expressed hope that the awards help enhance "our commitment to preparing Indonesia to become an advanced, prosperous and just country in the light of Indonesia celebrating its 100<sup>th</sup> year anniversary in 2045".

This year's PPD Award recipients are:

Provincial Category:

1. Central Java

2. South Sumatera  
3. West Java

Regential Category:

1. Temanggung  
2. West Aceh  
3. Garut

Best Planning and Achievement Category

Mayoral Category:

1. Sukabumi city  
2. Palu city  
3. Semarang city

Green Economy and Low Carbon Category:

• Riau

Circular Economy Category:

• Central Java

Innovation Related to

Alternative Financing of the

Private-Public Partnership

(KPBU) for Infrastructure

Provision Category:

• Madiun regency

